

ANALISA LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

Putu Anggreyani Widya Astuty
Universitas Victory Sorong
email : Putuwidya815@gmail.com

Abstract: *Government Regulation No.24 of 2005 regulates Government Accounting Standards, where this Government Regulation is the implementation of Law No. 17 of 2003 on State Finance, where Article 32 Paragraph (2) states that "Government Accounting Standards are compiled by an independent standards committee and stipulated by Government regulation, after first obtaining consideration from the Audit Board". The hypothesis of this research is that if the analysis of financial statements is carried out with government accounting standards, it can be used as the basis for decision making at the Maybrat Regency Financial and Asset Management Agency". Data analysis is the process of organizing the sequence of data, organizing it into a pattern, category, and basic description unit. Data analysis is an important stage in determining the course of the research process. Quantitative analysis in the form of financial statements obtained from the Financial and Asset Management Agency of Maybrat Regency is then analyzed using financial ratio analysis.*

Keywords: *Government Accounting Standards, BPKAD, Government Regulations.*

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transportasi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintah tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia, sedangkan pengertian pemerintah meskipun tampaknya konotasi lembaga publik lebih menonjol aspek ekonominya tidak dapat di kesampingkan. Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh

pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Memasuki abad baru, para pelaku ekonomi telah berubah secara signifikan dari segi ukuran maupun kompleksitas, dan pemakai yang berkepentingan jika telah bertambah secara substansial, baik dari segi jumlah maupun keragaman, artinya tanggung jawab yang dipikul oleh profesi akutan ini lebih besar dari pada sebelumnya. Akuntansi sebenarnya adalah fenomena sehari-hari.

Akuntansi keuangan menyangkut masalah pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi yang lain dan mengenai penyusunan berbagai laporan periodeik dari catatan-catatan tersebut. Akuntansi keuangan memiliki aturannya sifat baka, di sebut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Gerbang reformasi di Indonesia telah bergerak, sejarah baru ini secara politis telah mengubah arah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia secara menyeluruh pada hampir semua aspek kehidupan bernegara. Salah satu perubahan yaitu upaya untuk menciptakan *Good Governance* yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, nepotismedan penciptaan sistem pemerintah yang relatif lebih berimbang diantara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu, pemerintah untuk terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban public. Selain itu pula KSAP (Komite Standar akuntansi Pemerintahan) telah berhasil menyusun suatu standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar akuntansiSAP), tertanggal 13 Juni 2005. Dengan ditetapkannya standar akuntansi pemerintah di Negara Indonesia pengelolaan akuntansi pemerintah daerah di Indonesia telah bergerak kearah yang lebih baik.Hal ini terlihat melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) yang dapat dilihat pada situs resmi BPK – RI. Kegagalan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan akan merugikan mereka sendiri, karena mereka tidak akan dapat memenuhi tujuan khusus pelaporan keuangan, seperti menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi di miliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan

dengan laporan keuangan entitas yang lain. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Untuk akuntansi komersil, laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan (*statement of financial performance*) merupakan salah satu laporan keuangan entitas akuntansi pemerintahan yang dihasilkan menggunakan basis akrual (*cash toward to accrual*).pelaporan ini akan terlihat pendapatan yang diperoleh suatu entitas serta biaya dalam rangka perolehan pendapatan tersebut. Unsur-unsur laporan kinerja keuangan memuat IPSAS terdiri atas pendapatan kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan operasional, biaya pendidikan (*finance coast*) hakatas surplus/defisit dari investasi yang menggunakan metode akuitas, extraordinary item, hak monoritas (*minority interest*) atas surplus/defisit dan surplus/defisit bersih untuk tahun berjalan. Salah satu komponen laporan keuangan menurut PP 24 tahun 2005 adalah laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasional entitas. Apabila intentitas memperoleh pendapatan yang berasal dari pungutan pajak pendapatan tersebut dapat mengklasifikasikan sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Belanja dalam laporan realisasi anggaran dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan klasifikasi ekonomi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut mengenai jenis pendapatan disajikan dalam catatn atas laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dari penjelasan mengenai laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran dapat ditarik suatu benang merah yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kedua jenis laporan ini. Dalam akuntansi pemerintah yang menggunakan baSis akrual salah satu macam laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan kinerja keuangan.

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDN / APBD setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.Entitas pelaporan yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian Negara/lembaga dan bendahara umum Negara. Laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bendahara umum Negara setidaknya

tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca, laporan Arus, kas dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan keuangan di atas disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan. Kementerian Negara/lembaga (LKKL) sebagai pertanggung jawaban pelaksana APBN pada kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan (LKKL) yang disusun dilampiri dengan laporan keuangan badan layanan umum (BLU) bentuk ringkas dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan. Menteri keuangan selaku bendahara umum Negara menyusun laporan keuangan. BUN sebagai pertanggung jawaban pengelolaan perbendaharaan Negara.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksana kegiatan dana konsentrasi/tugas pembantuan. Kepada Gubernur/bupati/walikota menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan diterima dari satuan kerja perangkat daerah yang menjadi pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan selanjutnya menyampikan kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada presiden melalui menteri keuangan.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, interview, dokumentasi. Observasi adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan indra (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Interview (wawancara) menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada responden. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu guna mendapat data yang valid. Disamping menggunakan metode studi lapangan penulis juga menggunakan studi pustaka yakni dengan berbasis referensi buku-buku, untuk membantu penulis menganalisis dan mengkajinya sesuai dengan data empiris di lapangan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan sketsa.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan tahap yang

penting dalam menentukan jalannya proses penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa rasio keuangan.

PEMBAHASAN

Standart Akutansi Pemerintah (SAP) dan Dasar Hukum

Standart Akutansi Pemerintah selanjutnya disebut (SAP) merupakan prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuasaan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan Keuangan Daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dasar Hukum Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. 5. Standart Akutansi Pemerintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan APBD

Dalam proses penyusunan APBD/Perubahan APBD sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang dihasilkan sesuai kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maybrat. Tahun Anggaran 2013 sudah dijalani kerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat dalam mengaplikasikan SIMDA Keuangan Daerah untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 serta penyusunan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2013. Dalam proses pelaksanaan APBD, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengusulkan Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD kepada Bupati Maybrat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. BPKAD juga menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, batasan nilai uang persediaan, anggaran kas daerah, serta mengusulkan pejabat yang berwenang menandatangani surat penyediaan dana (SPD) dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD, dan kuasa BUD menerbitkan SP2D apabila dokumen SPM yang diajukan pengguna anggaran.

Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten Maybrat memiliki beberapa sumber pendapatan pokok, yaitu : (1) pendapatan asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah yang perkembangan ekonominya sangat didominasi sector sekunder dan tertier, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah. Bagi Pemerintah kabupaten Maybrat, pungutan pajak lebih didefinisikan sebagai cara memberikan kesejahteraan umum (redistribusi pendapatan) daripada sekedar budgeter.

KESIMPULAN

Pertumbuhan belanja Kabupaten menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 23,4% dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur kota terpadu, termasuk pemeliharannya. Dengan keterpaduan tersebut infrastruktur yang dibangun benar-benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehingga dapat menggerakkan kegiatan sosial ekonomi warga kabupaten tersebut. Kegiatan ekonomi yang berkembang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam pembiayaan pembangunan kota, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta.
- Erlina, Sri Mulyadi, 2007. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan., Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UUP STJM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi, 2006. Akuntami Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 "Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinlahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
- Sugiyono, 2006. Statistika Vntuk Penelitian. Cetakan Sembilan, CV Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nonior 33 lahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Interpretasinya. Peraturan Pemcrintah Nomor 5X tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah.
- Yuwono, S, J.T. Agus, dan Hariyandi. 2005, Penganggaran sector Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang.